

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI
DALAM RESES MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2010-2011
KE PROVINSI SUMATERA BARAT
11 – 12 APRIL 2011**

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sebagai lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengemban tiga fungsi yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan, melalui sebelas Komisi yang ada di DPR RI. Sebagai implementasinya, setiap Komisi mengadakan Rapat dengan Mitra Kerja baik melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun dengan Kunjungan Kerja ke Mitra Kerja di setiap reses masa persidangan.

Terkait dengan Kunjungan Kerja ke Mitra Kerja, dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2010-2011, Komisi I DPR RI yang membawahi bidang pertahanan, intelijen, luar negeri, serta komunikasi dan informatika (Kominfo) melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Adapun tujuan utama Kunker adalah mengawasi program pemerintah secara langsung terkait bidang tugas Komisi I DPR RI.

Pemilihan Provinsi Sumbar sebagai tujuan Kunjungan Kerja didasari oleh sejumlah pertimbangan:

Pertama, Provinsi Sumbar merupakan provinsi yang secara geografis rentan terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami. Untuk mengantisipasi sekaligus menanggulangi adanya bencana, peran TNI sangat penting dan diperlukan. Untuk itu, pemerintah khususnya aparat keamanan harus dalam kondisi siap untuk menangani bencana alam secara cepat dan tepat, dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur yang lengkap.

Kedua, keberadaan sejumlah pulau kecil di wilayah Sumbar berpotensi sebagai ancaman masuknya berbagai hal negatif. Untuk itu, pengawasan secara dini dan komprehensif merupakan hal penting.

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumbar dilaksanakan untuk mengetahui situasi dan kondisi di Provinsi Sumbar terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintah, khususnya yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI, berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya, hasil Kunjungan Kerja ini digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan Rapat-rapat Kerja dengan pemerintah dan instansi terkait dalam Masa Sidang IV Tahun Sidang 2010 – 2011.

C. Waktu dan Komposisi

Kunjungan kerja Komisi I DPR ke Provinsi Sumbar dilakukan selama dua hari, yakni tanggal 11 – 12 April 2011. Kunjungan Kerja tersebut diikuti oleh tiga belas orang Anggota Komisi I DPR RI, dua orang Sekretariat Komisi I DPR RI, satu orang Staf Ahli Komisi I DPR RI, dan satu orang Staf Pemberitaan DPR RI, yaitu:

No	Nama	No. Angg	Fraksi	Keterangan
1.	Tubagus Hasanudin, S.E., MM.	A-350	F-PDIP	Ketua Tim
2.	Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.	A-523	F-PD	Anggota
3.	Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawiria, S.IP., MM.	A-488	F-PD	Anggota
4.	Ir. H. Hari Kartana, MM.	A-479	F-PD	Anggota
5.	Drs. H. A. Muhammad Ruslan	A-211	F-PG	Anggota
6.	Paskalis Kossay, S.Pd., MM.	A-276	FPG	Anggota
7.	Ir. Dadoes Soemarwanto, M.Arch.	A-381	FPDIP	Anggota
8.	Drs. Sidarto Danusubroto, S.H.	A-347	FPDIP	Anggota
9.	Theodorus J. Koekerits	A-385	FPDIP	Anggota
10.	M. Syahfan Badri Sampurno	A-55	FPKS	Anggota
11.	DR. Muhammad Hidayat Nurwahid, MA.	A-80	FPKS	Anggota
12.	H. Amin Suparmin, S.HI	A-293	PPP	Anggota
13.	DR. H. A. Effendy Choirie, M.H.	A-107	FPKB	Anggota
14.	Anggrek Kurnianti, S.H.	Sekretariat Komisi I DPR RI		
15.	Sugeng Riyadi	Sekretariat Komisi I DPR RI		
16.	Nurul Faizah, S.IP., MTI.	Staf Ahli Komisi I DPR RI		
17.	Iwan Armanias	Staf Pemberitaan DPR RI		

Dalam Kunjungan Kerja tersebut, Tim juga didampingi oleh Pejabat dari Kementerian yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI.

D. Acara Kunjungan

Komisi I DPR RI melakukan sejumlah kunjungan dan pertemuan selama Kunjungan ke Provinsi Sumbar, sebagai berikut :

1. Senin, 11 April 2011
 - a. Pertemuan dengan Pangdam I/Bukit Barisan, Danrem 032/Wirabraja. Danlantamal II/Teluk Bayur ,dan Danlanud Tabing
 - b. Pertemuan dengan Kabinda Sumbar
 - c. Pertemuan dengan Gubernur Sumbar
2. Selasa, 12 April 2011
Pertemuan dengan Mitra Kerja Kominfo (Kepala Stasiun LPP TVRI, Kepala Stasiun LPP RRI, Kepala PT. Telkom Sumbar, Kepala Divisi Regional II PT Pos Indonesia Sumbar-Riau, Kepala LKBN Antara Sumbar, Ketua KPID Sumbar, Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Sumbar,dan PRSSNI Sumbar)

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

A. Paparan Pangdam I/Bukit Barisan (Diwakili oleh Kasdam)

1. Tugas Pokok Kodam I/BB adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan Kodam I/BB dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD.
2. Luas wilayah Kodam I/BB terdiri dari 992.154 KM2, terdiri dari 22,14% daratan dan 77,86% lautan. Adapun jumlah pulau sebanyak 3.357 buah dan 25 diantaranya merupakan pulau terdepan. Kodam I/BB mencakup lima Korem yakni Korem 022/PS Pulau Siantar, Korem 023/KS Sibolga, Korem 031/WB Pekanbaru, Korem 032/WBR Padang dan Korem 033 Tanjung Pinang.
3. Terkait dengan kesejahteraan di lingkungan Kodam I/BB telah terealisasinya tunjangan kinerja prajurit dan PNS TNI sebesar 37%.

B. Paparan Danlanud Padang

Lanud Padang merupakan pangkalan TNI AU tipe C, yang merupakan satuan pelaksana KOOPSAU I yang berkedudukan langsung dibawah PANGKOOPSAU I. Adapun tugas pokoknya adalah menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pengoperasian seluruh satuan dalam jajarannya, menyelenggarakan dukungan operasi udara, serta pembinaan potensi dirgantara.

C. Paparan Danlantamal II Padang

1. Lantamal II memiliki tugas pokok yakni menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL, melaksanakan penegakan hukum dan menjaga

keamanan di laut sesuai wilayah kerjanya, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan wilayah laut di wilayah kerjanya.

2. Wilayah Kerja Lantamal II berada antara 02 LU sampai dengan 06 LS dan 96 BT sampai dengan 104 BT, dengan luas 129.500 Km², luas laut teritorial 185.000 Km² dan panjang garis pantai 4.158 Km dari sebelah Timur mencakup perairan Bengkulu hingga ke Barat sampai dengan Perairan Pantai Barat Sibolga Sumatera Utara yang merupakan hamparan lautan Samudera Indonesia dan pada sebelah utara berbatasan dengan perairan India.
3. Gambaran kondisi sarana prasarana yang ada sebagai berikut:
 - a. Sebagian besar sarana prasarana merupakan peninggalan eks Lanal TBR dan pembangunan gedung baru jumlah maupun kemampuannya masih terbatas.
 - b. Kal/Patkamla yang dimiliki relatif sudah tua dan sering rusak.
 - c. Sebagian besar rumah dinas dan mess yang dihuni oleh anggota adalah milik PT Pelindo.
 - d. Kebutuhan fasilitas untuk hadirnya KRI seperti dermaga, bengkel, kapal, tangki timbun belum ada.
 - e. Unsur Patkamla, jumlahnya terbatas dan masih numpang sandar di dermaga milik PT Pelindo.

D. Pertemuan dengan KABINDA (Tertutup)

E. Pertemuan dengan Mitra di bidang Kominfo (Kepala Stasiun LPP TVRI, Kepala Stasiun LPP RRI, Kepala PT. Telkom Sumbar, Kepala Divisi Regional II PT Pos Indonesia Sumbar-Riau, Kepala LKBN Antara Sumbar, Ketua KPID Sumbar, Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Sumbar, dan PRSSNI Sumbar)

1. LPP TVRI Sumbar

- a. Konten tayangan LPP TVRI Sumbar terdiri dari berita dan informasi 31,43%, pendidikan 42,86%, dan hiburan (seni dan budaya) 25,71%. Khusus untuk tayangan lokal, sebanyak 31,71%. Adapun kinerja LPP TVRI tahun 2010 mencapai 93,75%.
- b. Dilihat dari luas wilayah Sumbar 42.130.82 Km², luas wilayah penerimaan TVRI sumbar mencapai 13.126.71 Km² (36%) dengan jumlah penduduk yang menerima siaran TVRI Sumbar adalah 891.928 (18,39%) dari keseluruhan penduduk Sumbar sebesar 4.845.998 jiwa.
- c. Siaran TVRI Sumbar belum menjangkau seluruh wilayah Sumbar disebabkan kondisi geografis dan daya pancar yang menurun. Sejumlah daerah di Sumbar belum terjangkau oleh siaran TVRI yakni Kabupaten Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, sebagian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagian kabupaten Solok Selatan, sebagian Kabupaten Pasaman, sebagian Kabupaten Pasaman Barat, sebagian Kabupaten Sijunjung, sebagian Kabupaten Agam, sebagian Kabupaten 50 Kota, sebagian

Kabupaten Tanah Data, sebagian Kabupaten Solok dan sebagian Kabupaten Solok. Sejauh ini, jumlah pemancar sebanyak 13 buah.

2. LPP RRI Sumbar

- a. Merujuk visi RRI 2010-2015: “RRI sebagai media pembentuk karakter bangsa,” pada tanggal 17 Februari 2011, RRI Padang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumbar sebagai benteng budaya minang.
- b. Meski RRI Padang diperkuat dengan 9 pemancar relay namun belum semua daerah terjangkau. Upaya mengatasinya, LPP RRI Padang bekerjasama dengan Bupati/Walikota untuk memperkuat pemancar relay seperti di Bukit Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan menjadi 1 KW, Kota Pariaman 500 watt, Bukit Pandai Sikek 1 KW.

3. LKBN Antara Sumbar

- a. Selama tahun 2010, Perum LKBN Antara telah memperluas jaringan pelayanan liputan informasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan ke 20 kota dan kabupaten Provinsi Sumbar dengan menempatkan satu wartawan di masing-masing daerah. Sejalan dengan itu, LBKN Antara menyebarkan produk berita dan foto kepada dua surat kabar harian (SKH Singgalang, SKH Haluan), web/portal Sijinjaw News, dua Radio swasta (Sushi FM dan Classy FM) dan radio milik Pemda Kab. Kepulauan Mentawai.
- b. Didukung 25 tenaga wartawan yang tersebar di kabupaten dan kota di Sumbar, LKBN Antara Sumbar mampu memproduksi 80 hingga 100 berita/hari yang disiarkan melalui *Pertama*, jaringan internet kepada pelanggan yakni media cetak, elektronik dan media maya. *Kedua*, disiarkan langsung melalui portal berita www.antara-sumbar.com
- c. LKBN Antara memberi masukan agar UU Pokok Pers masih perlu direvisi mengingat masyarakat membutuhkan berita yang mendidik, sehat dan berimbang. Untuk itu, pasal 17 ayat 2 UU No 40 Tahun 1999, tentang Pers “Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*Media Watch*),” perlu diberi penguatan. Sejalan dengan itu, LKBN Antara memberikan catatan sebagai berikut :
 - 1). Kedudukan media cetak dalam UU Pers perlu disamakan dengan media online, sehingga diperlakukan sama oleh pemerintah dan masyarakat.
 - 2). Media *online* sebagai perkembangan terbaru peradaban khususnya perkembangan TI, terbukti telah memberi kontribusi besar dalam liputan dan penyebarluasan informasi
 - 3). Perlunya regulasi tentang penerbitan portal berita media online dan aturan pengutipan berita.

4. KPID Padang

- a. KPID Sumber telah melakukan proses perijinan terhadap: 112 Lembaga Penyiaran Swasta, 22 Lembaga Penyiaran Komunitas, 3 Lembaga Penyiaran Publik dengan perincian kategori : radio sebanyak 114, Televisi 22 dan TV Berjaringan Jakarta 15 buah.
- b. Terkait dengan pelaksanaan program kerja 2010, KPID telah melakukan evaluasi program kerja KPID 2010, seperti tersaji pada tabel 8:

Tabel 8
Evaluasi Program Kerja KPID 2010

Deskripsi	Keterlaksanaan	Kendala
Riset Isi Siaran	75%	Keuangan
PengembanganSDM Lembaga Penyiaran	0%	Keuangan/Instruktur
Pemantauan Rutin	50%	Keuangan/Transportasi
Hearing Terpadu Pemuka Masyarakat	65%	Infrastruktur/Keuangan
Sarana Media Publikasi	35%	Infrastruktur/Keuangan
Sosialisasi & Publikasi	55%	Keuangan

- c. Merujuk aduan yang disampaikan kepada KPID Sumbar selama tahun 2010 dan triwulan pertama 2011, Masyarakat Sumbar mengeluhkan sejumlah tayangan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 9
Keluhan Tayangan Televisi dari Masyarakat Sumbar

Jenis Keluhan	Prosentase
Kekerasan	15%
Pornografi	10%
Kurangnya perlindungan terhadap anak dan remaja	25%
Gossip/Infotainment	15%
Reality Show	20%
Mistik	25%

- d. KPID Sumbar telah melakukan penelitian mengenai kesalahan yang dilakukan oleh media berdasarkan penilaian dari masyarakat Sumbar. Hasil lengkap tersaji pada tabel 10 dibawah ini:

Tabel 10
Tujuh Dosa Media Menurut Masyarakat Sumbar

Kategori	Prosentase
Distorsi Informasi	19%
Dramatisasi fakta palsu	15%
Mengganggu privasi	15%
Pembunuhan karakter	10%

Eksplorasi seks	10%
Meracuni pikiran anak-anak	20%
Penyalahgunaan kekuasaan	11%

(Paul Johnson, 1997/ kuesioner menali)

5. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Padang

- a. Tahun 2010, Loka Monitor Padang melaksanakan kegiatan antara lain:
- 1). Kegiatan rutin observasi kepadatan pengguna spektrum frekuensi berdasarkan Band Frekuensi dengan hasil sesuai dengan peruntukan.
 - 2). Kegiatan verifikasi dan validasi data terhadap stasiun radio untuk mencocokkan data SIMF dengan data lapangan.
 - 3). Pengukuran parameter teknis stasiun radio mencakup radio siaran FM, televisi siaran, operator seluler.
 - 4). Operasi penertiban pengguna frekuensi radio dalam rangka tindak lanjut dari kegiatan observasi dan validasi terhadap pengguna frekuensi yang masih belum mematuhi ketentuan penggunaan frekuensi radio. Dari hasil kegiatan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh PPNS Loka Monitor Padang
 - 5). Pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Sumbar, dapat dilihat pada tabel 11:

Tabel 11
Pengguna Frekuensi di Sumbar

Media	Keterangan
Radio Siaran FM	84 Stasiun
Radio Siaran AM	1 Stasiun
Televisi Siaran 17 Penyelenggara	17 Penyelenggara (25 stasiun pemancar)
Operator Seluler	9 Operator (CDMA, GSM, 3G)
Komunikasi Penerbangan dan Maritim	-
Radio Konsesi dan Amatir	-

6. PT. Telkom Sumbar

- a. Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan pemilik mayoritas perusahaan adalah pemerintah Indonesia (Total *shares* = 20.159.999.280, termasuk 1 Dwiwarna *share series A*). Adapun posisi per 31 Desember 2011 sebagai berikut: Pemerintah Indonesia 10.320.470.711 (52,5%), Lokal 1.339.452.296 (6,8%), Asing 8.009.478,660 (40,7%), *Treasury stock* 490.574.500
- b. Total pendapatan Telkom mencapai Rp 68,6 Triliun yang didapat dari seluler, data, internet dan IT, *fixed line*, intercon, network, G&A dan marketing. Sementara itu, estimasi pembayaran dividen tahun 2010 sebesar Rp 3,3 Triliun.

- c. Dari 12 Pulau Terluar dengan tingkat kerawanan tinggi, Telkom telah membangun Fastel 6 Lok dan Telkomsel telah membangun Fastel Merah Putih di 27 Kabupaten Daerah Perbatasan. Telkom juga telah membangun broad Learning Center di Sumbar tepatnya di Padang dan Bukit Tinggi serta Taman Digital di Padang.

7. PT. Pos Indonesia

- a. PT. Pos Indonesia wilayah Divre II mencakup Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Visi PT. Pos Indonesia 2011-2013 adalah "*Indonesia's Leader in the mail, logistics dan financial service*" sedangkan misinya adalah PT Pos menyediakan solusi handal dalam layanan mail, logistik, dan jasa keuangan dengan menggunakan jejaring bisnis dan infrastruktur terluas dan terpadu serta mengembangkan hubungan kolaboratif.
- b. Program kerja PT. Pos Indonesia Sumbar secara internal : *operation excellence, service excellence, physical evidence*. Sedangkan eksternal : perluasan/penambahan service poin antara lain : Rencana penyediaan layanan pos di Tuapejat, ibu kota kabupaten Kepulauan Mentawai serta memperbanyak agen pos dengan bekerjasama dengan koperasi dan perorangan serta kerjasama *corporate mail management (mailing room)* dengan bekerjasama instansi pemerintah dan swasta.
- c. Kemajuan TIK telah dimanfaatkan PT. Pos Indonesia untuk mendukung *core business: mail, logistics dan finance service*. Kehadiran TIK memungkinkan surat/dokumen atau barang dilacak, pengiriman uang (online) secepat SMS, PosPay untuk pembayaran pajak, listrik, air, telepon, cicilan/kredit serta Giro Online yang memungkinkan penyaluran dana bantuan pemerintah dan NGO.
- d. Pos Express dan Pos Kilat khusus diminta oleh masyarakat Sumbar yakni mencapai 21% karena kepastian dan kecepatan sampai ke alamat tujuan, terutama pada masa-masa menjelang hari besar keagamaan. Sedangkan layanan bisnis keuangan yakni PosPay dan Wesel Instan yang diminta mencapai 39% karena sudah berkonten teknologi.
- e. Untuk kepulauan Melawai, PT Pos Indonesia Sumatera Barat sudah memiliki KP Cabang di Pulau Siberut (yakni di KP Cabang Muara Sikabalan, Kp Cabang Muara Siberut/online), Pulau Sipora (yakni Kp Cabang Sioban, Kp Cabang Tua Pejat di tahun 2011), Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan dilayani di Kp Cabang Sikakap.

III. PERMASALAHAN

A. Kodam I/BB

1. Tidak adanya dukungan alat angkut berupa *speedboat* guna mendukung pelaksanaan operasi pengamanan pulau-pulau kecil terdepan di Pulau Berhala, Pulau Nipah dan Pulau Sekatung.
2. Kekurangan fasilitas kantor, perumahan, logistik dan latihan di satuan jajaran Kodam I/BB. Selain itu, kondisi sarana prasana di satuan umumnya tergolong cukup tua sehingga memerlukan perbaikan. Adapun Alat Komunikasi (Alkom) terkendala tidak adanya alat komunikasi berupa HT untuk para Babinsa di wilayah.
3. Perlengkapan alat berat yang dibutuhkan untuk menunjang penanganan bencana alam khususnya gempa antara lain : Beco, greder, alat angkut personil, motor boat, speed boat, amblan, alat air bersih.
4. Denzipur Kodam I/BB menghadapi kendala keterbatasan sarana dan prasarana (Kondisinya 50 persen) sehingga belum bekerja secara maksimal khususnya dalam membantu penanganan bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumbar.

B. Lanud Padang

1. Untuk bidang Logistik, permasalahannya adalah: Fasilitas dukungan operasi penerbangan sangat terbatas, termasuk *crash team* sehingga mempengaruhi tingkat keselamatan terbang dan kerja, jumlah senjata perorangan kurang dan tidak standar. Selain itu, mengingat pangkalan yang sangat luas maka perawatan yang dilakukan belum maksimal.
2. Beberapa jabatan struktural di Lanud Padang masih kosong. Adapun perwira pejabat yang dibutuhkan adalah Karuops, Kasiwatpers, Paroh, Si Idik dan Si Pamfik.
3. Untuk sarana prasana, permasalahan yang terjadi antara lain:
 - a. Belum serahterima aset-aset ex Bandara Tabing dari pihak PT Angkasa II ke TNI AU kepada Lanud Padang sesuai amanat dalam kesepakatan bersama antara TNI AU, Dirjen Perhubungan Udara dan PT AP I dan AP II.
 - b. Fasilitas bangunan dan instalasi kantor banyak yang rusak karena usianya tua.
 - c. Tanah HPL Lanud yang sudah dipagar baru mencapai 25% dari luas total tanah.
 - d. Jumlah personel Fasint (BA/TA/PNS) masih kurang dibandingkan dengan luas areal tanah dan bangunan yang dipelihara.
 - e. Jumlah senjata yang ada tidak mencukupi untuk semua personil Lanud Padang.
4. Permasalahan Tanah
 - a. Aset tanah ex lapangan terbang Piobang dan Gadut belum bersertifikat.
 - b. Masih terdapat bidang tanah lanud Padang yang dihuni oleh penghuni ilegal sebanyak 197 KK. Terkait kasus ini sudah dilayangkan peringatan tertulis akan tetapi belum ada tindak lanjut dari para penghuni ilegal tersebut.
5. Permasalahan lain terkait dengan:
 - a. Bidang Pomau: Belum adanya kendaraan patroli roda empat dan mobil kawal untuk melaksanakan patroli di wilayah hukum Lanud Padang yang cukup luas, belum adanya kazeneering untuk mess Pomau.

- b. Bidang hukum: Beberapa bidang dari aset tanah TNI AU diklaim dan digarap oleh masyarakat setempat.
- c. Bidang Kesehatan: satu unit mobil ambulance Mercy standar Vito pengadaan dari Bekmatpus sudah tidak dapat dioperasikan karena rusak mengingat kesulitan mendapatkan spare part, fasilitas rawat mondok/inap yang tidak memadai sehingga harus merujuk ke Rumah Sakit Tentara Tk IV dari Reksodiwiryo Padang.
- d. Bidang Senkom: Belum memiliki Radio VHF *Ground To Air Portable* untuk mendukung operasional penerbangan, Battery Nicad HT UHF untuk dukungan Kamhanlan banyak yang U/S buah.
- e. Bidang Intelijen Udara: Pada saat ini intelpam Lanud Padang kekurangan personel PA/BA sehingga dalam melaksanakan kegiatan pengamanan kurang maksimal. Selain itu, Sumbar merupakan daerah rawan bencana, untuk itu dibutuhkan Posko Tanggap Bencana di Bandara Internasional Minangkau (BIM) oleh karena Saspres di BIM lengkap.

C. Lantamal II Padang

1. Dukungan anggaran dan Sarpras yang dimiliki Lantamal II guna mendukung kegiatan rutin sangat terbatas dan kurang memadai, mencakup antara lain : Beberapa satker belum memiliki tempat yang memadai yakni Diskes, Disang dan Disbek, kondisi Kal/Patkamla yang sudah tua dan rusak sehingga penggunaannya tidak optimal untuk mendukung operasi keamanan laut, rumah dinas Mess milik PT Pelindo yang ditempati oleh aparat secara hukum belum merupakan rumdis TNI AL. Sementara lahan untuk menambah fasilitas rumdis dan mess anggota belum tersedia.
2. Untuk bidang operasional pengamanan laut, dengan cakupan wilayah laut yang luas sementara alat apung/sarana patroli laut terbatas, maka pengamanan kurang optimal.
3. Perubahan status Lanal menjadi lantamal belum disertai dengan peningkatan komposisi personel serta pengembangan sarana prasarana yang diperlukan. Selain itu, Lantamal II masih menghadapi keterbatasan jumlah unsur patroli termasuk keberadaan Yonmarhanlan belum dilengkapi dengan personel memadai.
4. Sebagai pendukung operasional, Lantamal Padang belum memiliki sarpras yang memadai untuk menunjang kontinuitas operasional KRI yang beroperasi di Sumbar.
5. Dalam bidang intelijen, Lantamal menghadapi permasalahan keterbatasan kemampuan secara kualitas maupun kuantitas mengingat luas wilayah yang perlu diamati dan dideteksi.

D. BIN Padang (Tertutup)

E. Kominfo

1. LPP TVRI Sumbar mengalami kesulitan untuk melakukan kerjasama produksi dan penyiaran dengan Pemkot/Pemkab dan instansi terkait lainnya mengingat keterbatasan daya pancar/penerimaan terhadap siaran TVRI Sumbar.

2. Terbatasnya jumlah personil di LPP TVRI baik di bidang program, berita, teknis, marketing, sehingga terjadi rangkap profesi dan mengakibatkan kinerja belum sepenuhnya maksimal.
3. Belum adanya ketegasan kelembagaan mengenai LPP yang tercantum dalam perangkat kelembagaan negara sehingga mengakibatkan pos untuk LPP hanya tercantum dalam pos belanja lain-lain (bukan khusus). Dampaknya, dukungan dana untuk LPP termasuk LPP TVRI Sumbar dan LPP RRI Sumbar masih terbatas.
4. Dukungan sarana dan prasara baik di LPP TVRI maupun LPP RRI masih terbatas antara lain jumlah pemancar, rendahnya kualitas daya pancar transmisi (untuk TVRI menurun dari 11.521 menjadi 4.545 watt atau hanya sekitar 38,55% dari kapasitas awal), sarana prasarana transmisi tidak memadai.
5. Kanal frekuensi radio di Sumbar terbatas padahal jumlah permintaan izin melebihi jumlah kanal tersedia, terutama di Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Selain itu, keinginan dan minat masyarakat pemohon dari Lembaga Penyiaran Berbeda-beda untuk wilayah layanan Kabupaten/Kota.
6. KPID Sumbar menghadapi kendala untuk melakukan pemantauan isi siaran ke daerah-daerah yang menjadi wilayah hukum KPID Sumbar karena transportasi yang terbatas. Selain itu, sarana dan prasarana penunjang dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat seperti laboratorium monitoring isi siaran yang lengkap dengan piranti monitor dan staf serta biaya operasional untuk menyelenggarakan kegiatan riset, perencanaan, komunikasi dan evaluasi juga terbatas.

IV. KESIMPULAN

1. Mengingat Provinsi Sumbar tergolong rawan bencana khususnya gempa dan tsunami, dan peran aparat keamanan sebagai salah satu garda terdepan dalam penanggulangan bencana, maka Komisi I DPR RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kodam I/BB, Lantamal II Padang dan Lanud Padang agang dilengkapi sarana prasarana termasuk peralatan komunikasi yang memadai serta ketersediaan personil yang cukup sehingga aparat keamanan dapat terlibat dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat.
 - b. Menambah Denzipur di Kodam I/BB sehingga penambahan struktur baru dapat memudahkan aparat keamanan terlibat dalam penanganan bencana secara cepat. Keberadaan Denzipur diarahkan ke daerah rawan bencana yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kabupaten Pariaman.
2. Belum ada alat angkut berupa *speedboat* guna mendukung pelaksanaan operasi pengamanan pulau-pulau kecil terdepan di Provinsi Sumbar yakni di Pulau Berhala, Pulau Nipah dan Pulau Sekatung, maka Komisi I DPR RI akan membicarakan dengan Kementerian Pertahanan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
3. Sehubungan belum dilakukannya serah terima aset-aset ex Bandara Tabing dari pihak PT Angkasa II ke TNI AU kepada Lanud Padang sesuai amanat dalam kesepakatan bersama

antara TNI AU, Dirjen Perhubungan Udara dan PT AP I dan AP II, maka Komisi I DPR RI akan membicarakannya dengan mitra terkait.

4. Sejalan dengan langkah pemerintah melakukan penataan aset di lingkungan TNI, maka Komisi I DPR RI akan berkoordinasi dengan Panja Aset Tanah DPR RI mengingat aset tanah ex lapangan terbang Piobang dan Gadut belum bersertifikat dan masih terdapat bidang tanah Lanud Padang yang dihuni oleh penghuni ilegal sebanyak 197 KK.
5. Terkait dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh mitra kerja bidang Kominfo di Propinsi Sumbar, Komisi I DPR RI akan membicarakannya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan mitra kerja terkait lainnya.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi I ke Provinsi Sumbar. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi I DPR RI dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah khususnya mitra kerja Komisi I pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2010-2011.

Jakarta, 10 Mei 2011
**TIM KUNKER KOMISI I DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,**

TUBAGUS HASANUDDIN
A- 350